

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PENGIRIMAN BARANG  
JASA ANGKUTAN DARAT (STUDI PT. ANDALAS WAHANA REZEKI  
(AWR) SIKUMBANG GROUP CABANG BUKITTINGGI)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**



**Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)**

**Pembimbing :**

**Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd  
Neneng Oktarina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 22/PK-II/III/2024**

## ABSTRAK

Perdagangan yang didukung kemajuan teknologi ini mempengaruhi segala hal termasuk pengiriman barang, Namun banyak ditemukan perjanjian yang dibuat sudah berbentuk baku dan mengandung klausula eksonerasi, hal ini bertentangan dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait larangan pencantuman Klausula baku khususnya diatur dalam huruf (b), Adanya pengawasan pencantuman dari klausula baku ini dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan Pasal 52 huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab PT.AWR Sikumbang Group Cabang Bukittinggi terhadap pencantuman klausula eksonerasi? 2) Bagaimana kedudukan BPSK Kota Bukittinggi dalam mengawasi pencantuman klausula eksonerasi? Penelitian bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil : 1) Tanggung Jawab PT.AWR Sikumbang Group terhadap pencantuman klausula eksonerasi adalah melakukan ganti rugi sesuai dengan STT. 2) Kedudukan BPSK Kota Bukittinggi dalam mengawasi pencantuman klausula eksonerasi tidak terlaksana dikarenakan adanya beberapa kendala seperti dana, kelembagaan, dan SDM. Dapat ditarik kesimpulan 1). Tanggung Jawab PT.AWR Sikumbang dalam pencantuman klausula eksonerasi ialah PT.AWR bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam pengiriman dengan melakukan ganti rugi terhadap barang-barang konsumen yang rusak dan hilang sesuai dengan nominal barang, ongkos kirim. 2)Kedudukan BPSK belum terlaksana sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang karena ada beberapa kendala yang mengakibatkan BPSK tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Saran yang dapat diberikan 1) PT. AWR Sikumbang Group agar tidak mencantumkan klausula eksonerasi yang nantinya akan merugikan pihak konsumen. 2) Pemerintah bisa memfokuskan dan mengoptimalkan anggaran yang diberikan kepada BPSK agar BPSK bisa menjalankan tugas dan wewenang sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Pengangkutan, BPSK